



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

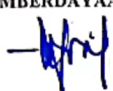
No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- 9.55
	Keg Meningkatkan Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPPIP)	- Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPPIP)	- 100
	Sub.keg Tersusunnya dokumen FS Kawasan Industri	- Jumlah dokumen FS Kawasan Industri yang tersusun	- 1
	Sub.keg Meningkatkan daya saing industri melalui standarisasi industri	- Jumlah pelaku industri yang meningkat daya saingnya	- 80
	Sub.keg Terbinanya dan terfasilitasinya Pelaku usaha industri	- Jumlah pelaku usaha industri yang mendapat pembinaan dan terfasilitasi	- 170
2	Meningkatnya pemanfaatan Pengelolaan SIINas	- Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	- 87
	Keg Meningkatkan Pengelolaan SIINas	- Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas	- 10
	Sub.keg Terpenuhi Data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah data dan informasi industri yang dikeluarkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 2
	Sub.keg Terpenuhi Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui (SIINas)	- Terpublikasinya data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 1
	Sub.keg Terpantaunya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah perusahaan yang telah melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- 134

1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,605,812,050	APBD
	Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1,605,812,050	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	= Rp. 1,061,276,800	
	Sub.keg Meningkatkan daya saing industri melalui standarisasi industri	= Rp. 184,551,050	
	Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	= Rp. 359,984,200	
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp. 187,048,500	APBD
	Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp. 187,048,500	
	Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	= Rp. 54,008,650	
	Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	= Rp. 87,723,300	
	Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penvampaian Data ke SIINas	= Rp. 45,316,550	

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

MIRA YULASTUTI, ST.MP
Nip. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

MIRA YULASTUTI, ST.MP
Nip. 19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831/200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hj. MAHNILA JOTOLEMBAH,SE
NIP. 19661028 199203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	- INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	- 66
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 1 Dokumen
	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- 14 Laporan
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	- Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat Daerah	- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	- 1 Dokumen
	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah	- Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	- 60
	Terwujudnya penerapan SPBE Perangkat Daerah	- Indeks SPBE Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	- 60
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	- Tingkat Digitalisasi Perangkat Daerah	- 62
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- 1 Laporan

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Kegiatan**
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

= Rp. 17.001.172.143 APBD

= Rp. 658.460.300 APBD

= Rp. 14.430.057.683 APBD

= Rp. 255.093.700 APBD

= Rp. 172.493.100 APBD

= Rp. 389.828.840 APBD

= Rp. 43.747.400 APBD

= Rp. 586.966.820 APBD

= Rp. 464.524.300 APBD



Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

HJ. MAHNI JOTOLEMBAH, SE
 Nip. 19661028 199203 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO MARDIONO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008

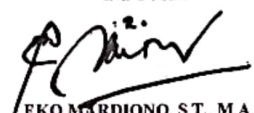
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	- 9.55
	Keg Meningkatkan Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	- Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	- 100
	Sub.keg Terlaporkannya hasil fasilitasi bina industri	- persentase fasilitasi bina industri	- 100
	Terfasilitasinya pendampingan pengyusunan draf dokumen teknis RPIK	Jumlah laporan pendampingan pengyusunan draf dokumen teknis RPIK	- 2
	Terevaluasi hasil penerapan kebijakan industri	Jumlah dokumen evaluasi penerapan kebijakan industri	- 4
	Terevaluasinya pelaksanaan rencana pembangunan industri yang merupakan turunan dari RIPIN	Jumlah dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- 2
	Sub.keg Terbinanya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Industri	- Jumlah Laporan Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Alam Untuk Industri	- 1 Dokumen
	Terbinanya Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Program Vokasi	- 1 Dokumen
2	- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	- Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	- 71%
	Keg Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	- Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	- 71%
	Sub.keg Terselenggaranya Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian kewenangan provinsi	- 1 Dokumen
	Sub.keg Terselenggaranya Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	Jumlah dokumen hasil Pengendalian terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian berbasis risiko	- 1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 502,556,150	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 502,556,150	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 217,005,600	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 285,550,550	
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 247,829,900	APBD
Keg Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	= Rp. 247,829,900	
Sub.keg Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	= Rp. 109,795,900	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	= Rp. 138,034,000	

Palu, 20 Februari 2024


PIHAK KEDUA
Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang ketentuan perdagangan	- Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	- 100%
	Keg. Meningkatkan proses penerbitan rekomendasi teknis Bahan Berbahaya bagi distribusi sesuai standar	- Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	- 100%
	Sub.keg Terlayannya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentase Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	- 100%
2	- Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar	- Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	- 10%
	Keg. Meningkatkan ketersediaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	- Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar	- 10%
	Sub.keg Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- 1 Pasar Rakyat Kab/kota
	Sub.keg Terbinanya Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Penjual dan Pembeli yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	- 2 Pelaku Usaha/Tahun
3	- Meningkatkan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (koefisien variasi harga 4-6%)	- 4-6 %
	Keg. Meningkatkan jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- 100%
	Sub.keg Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	- 12 Laporan Bulanan
	Keg. Meningkatkan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan	- 90%
	Sub.keg Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Jumlah Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- 12 Dokumen
	Sub.keg Terpenuhiya Operasi Pasar Bersubsidi dalam rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	- Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	- 8 Kegiatan/Tahun
	Keg. Meningkatkan kualitas pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	- 90%
	Sub.keg Tersusunnya data penyaluran pupuk bersubsidi hasil koordinasi dan sinkronisasi	- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	- 4 Laporan/Triwulan
4	- Meningkatkan omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	- Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan pemasaran produk dalam negeri	- 10%
	Keg. Meningkatkan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	- Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	- 10% Kenaikan Omzet
	Sub.keg Terdampingnya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	- Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing dan keikutsertaan dalam pameran produk dalam negeri	- 50 UMKM

Keg.	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	-	Persentase penggunaan produk dalam negeri	-	10%
Sub.keg	Terlatihnya masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	60 orang/tahun

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 72,809,000	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	Rp. 72,809,000	
Sub.keg Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	= Rp. 72,809,000	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 145,461,700	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 145,461,700	
Sub.keg Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	= Rp. 89,503,900	
Sub.keg Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	= Rp. 55,957,800	
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 1,855,458,850	APBD
Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 79,266,100	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	= Rp. 79,266,100	
Keg. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok	= Rp. 1,726,442,750	
Sub.keg Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	= Rp. 261,768,700	
Sub.keg Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	= Rp. 1,464,674,050	
Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	= Rp. 49,750,000	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	= Rp. 49,750,000	
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 251,553,750	APBD
Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 203,081,750	
Sub.keg Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	= Rp. 203,081,750	
Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	= Rp. 48,472,000	
Sub.keg Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Rp. 48,472,000	

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI



DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
NIP. 19770405 200212 1 009





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA,SE
NIP. 19731121 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Kerajinan Daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatkan Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- Meningkatkan Fasilitas Layanan /Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 987,535,088	APBD
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1,013,478,982	APBD

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA
PIH. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 49730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH



HAPIT FOLLA SE
NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJIJI, S.Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

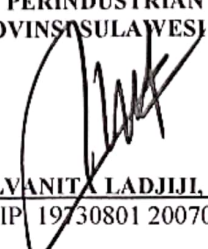
Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJIJI, S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatnya Standardisasi Mutu Barang	- Persentase sertifikat pengujian dan kalibrasi yang diterbitkan	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 3,230,023,634	APBD
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 566,903,615	APBD



Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG

NOLVANTA LADJILI S. Ag. M.M.
NIP. 197308012007012029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2024

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 66
	- Meningkatnya Perlindungan Konsumen	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	= Rp. 407,043,480	APBD
2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1,195,419,650	APBD



Palu, 20 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006